

**PENGURUSAN IDENTITAS KARTU TANDA PENDUDUK TERHADAP  
ANAK JALANAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT  
ADMINISTRATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24  
TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
(Studi Kasus di Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Jombang)**

Lutfi Syifa'ul Qolbi<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : [Sifafil596@gmail.com](mailto:Sifafil596@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Accurate population administration data is very much needed, this research is motivated by the existence of legal uncertainty for street children as Indonesian citizens who are disciplined in administration especially in making KTPs. From this background, the formulation of the problem includes: How is the implementation of making ID cards if they do not have complete biodata? The purpose of this study was to determine the handling of street children who are vulnerable to population administration in Jombang Regency. This study uses a type of empirical juridical research using a sociological juridical approach. The results showed that street children who are vulnerable to the identity of their population administration can still make Identity Card through the Social Service to the Population and Civil Registry Office. The obstacle is the lack of biodata possessed by street children so that the agency is related to the difficulty in registering data.*

**Keywords:** *Management of KTP, street children, Population Administration.*

**ABSTRACT**

Data administrasi kependudukan yang akurat sangat diperlukan, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketidak kepastian hukum bagi anak jalanan sebagai warga Negara Indonesia yang tertib administrasi khususnya dalam membuat KTP. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah meliputi: Bagaimana pelaksanaan pembuatan KTP apabila tidak memiliki biodata yang lengkap?, Apa yang menjadi hambatan bagi Dinas Sosial dan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk pelaksanaan pembuatan kartu identitas bagi masyarakat rentan administrasi di Kabupaten Jombang?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penanganan terhadap anak jalanan yang rentan akan administrasi kependudukan Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris* dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak jalanan yang rentan identitas administrasi kependudukannya tetap bisa melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk melalui Dinas Sosial ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hambatannya yaitu kurangnya biodata yang dimiliki oleh anak jalanan sehingga dinas terkait kesulitan untuk mendata.

**Kata Kunci :** Pengurusan KTP, anak jalanan, Administrasi Kependudukan.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>2</sup> Oleh karenanya data administrasi kependudukan yang akurat sangat diperlukan baik guna melaksanakan rencana program pembangunan maupun demi tertibnya administrasi hukum di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk.

Indonesia juga merupakan salah satu negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar, Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai permasalahan tentang data diri (identitas) terhadap penduduknya. Oleh sebab itu maka peran negara untuk mengurus tentang data diri (identitas) ini sangat penting bagi setiap individu untuk memperolehnya, terutama bagi penduduk yang rentan administrasi.

Pemerintah dalam menjalankan pelayanannya memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi pokok yang tidak melihat tingkat atau setrata dalam masyarakat (deskriminasi) yaitu: fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan, fungsi perlindungan yang kemudian akan melahirkan barang dan jasa yang dapat dibutuhkan dalam Etika Administrasi Negara.

Anak merupakan tunas bangsa yang harus memperoleh perlindungan yang memadai. Perlindungan hukum merupakan aspek penting dari suatu negara hukum. Indonesia telah mengatur perlindungan bagi anak di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada pasal 28b ini berarti bangsa Indonesia memandang perlindungan bagi anak sebagai suatu agenda<sup>3</sup>

Dalam pembuatan identitas kependudukan pemerintahan memiliki mekanisme dalam sistem pemerintahan, yang menjadi hal pokok dalam pembuatan identitas kependudukan adalah suatu pelayanan yang terdiri dari penyelenggaraan dan penerimaan layanan.

Negara Indonesia memiliki peraturan tentang bagaimana cara mengurus identitas terhadap individu yang belum memiliki identitas yang diatur dalam

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>3</sup> Arfan Kaimudin, (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia, *Yurisprudensi Jurnal fakultas Hukum Universitas Islam Malang*. Vol 2. No. 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengertian administrasi kependudukan diatur dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

Dalam administrasi Kependudukan proses penerbitan dan data kependudukan itu dilakukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, layanan yang diberikan dalam administrasi penduduk tersebut meliputi pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 15 yang berbunyi:

“Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Intansi Pelaksana”.<sup>4</sup>

Obyek pelayanan pencatatan sipil adalah mencatat atau membuat catatan peristiwa penting dalam register pencatatan sipil. Dalam organisasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai tujuan utama untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan identitas dan sebagainya. Pembuatan identitas ini dilakukan di pelayanan Kantor Pencatatan Sipil, pelayanan *public* ini sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Catatan Sipil merupakan bagian dari sistem administrasi kependudukan secara keseluruhan terdiri atas sub sistem pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Kedua hal tersebut mencakup hak asasi bagi semua manusia yang berada dalam suatu negara. Dengan demikian, bukan berarti pendaftaran penduduk identik dengan pencatatan sipil. Keduanya dapat dibangun dalam satu sistem dan dapat dikategorikan dalam pelayanan publik. Yang mana pencatatan sipil memiliki aspek hukum yang membawa akibat hukum yang luas bagi setiap warga negara.

Pengertian pendaftaran penduduk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 10 yang berbunyi:

“Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 1 Angka 15.

Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan”.<sup>5</sup>

Dalam pendaftaran penduduk yang dicatat ialah hal-hal yang berkenaan dengan biodata atau data penduduk yang harus dilaporkan. Dari sisi perlindungan dan pengakuan hukum pendaftaran penduduk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan hukum terhadap status pribadi atas setiap peristiwa kependudukan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Peraturan Presiden Pasal 2 ini menjelaskan bahwa :

“pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas:

- a. Pencatatan biodata penduduk;
- b. Penerbitan KK;
- c. Penerbitan KTP-el;
- d. Penerbitan KIA;
- e. Penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
- f. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan”.<sup>6</sup>

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Jombang dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pembuatan kartu identitas penduduk di Kabupaten Jombang dan untuk mengetahui upaya apa yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik analisis data menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan dan menggambarkan mengenai peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan mengambil kesimpulan yang digunakan untuk menjawab atau mencari solusi dari permasalahan yang ada.

## PEMBAHASAN

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, (2019), *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 7.

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Bab II Pasal 2.

### **Profil Dinas Sosial Kabupaten Jombang**

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial;
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial; dan
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Mekanisme Penanganan Anak Jalanan Yang Rentan Adminitrasi**

Pelayanan Dinas Sosial terhadap anak jalanan di Kabupaten Jombang sudah sesuai prosedur dalam penanganannya. Penangkapan anak jalanan sebagai tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) karena Dinas Sosial tidak memiliki kewenangan dalam penangkapan anak jalanan, kewenangan Dinas Sosial yakni penanganan, pembimbingan dan pengembalian kepada orang tua atau wali. Alternatif pertama terhadap anak jalanan yang terkena jaring Satuan Polisi Pamong Praja yakni dikembalikan kepada orang tua atau wali (Keluarga), jika anak tersebut tidak memiliki keluarga atau keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk menerima anak tersebut, maka anak tersebut dapat di titipkan di panti asuhan untuk mendapat bimbingan yang lebih baik.

Dari penelitian yang saya lakukan pada tanggal 8 januari 2020 di Dinas Sosial Kabupaten Jombang, pada hari itu Satuan Polisi Pamong Praja melakukan oprasi terhadap anak jalanan yakni terdapat kurang lebih 20 orang anak jalanan, akan tetapi 6 orang anak jalanan yang terjaring dalam oprasi tersebut diantaranya 5 orang anak di bawah umur dan 1 orang anak dewasa, anak tersebut dapat dikatakan dewasa karena sudah berumur 20 tahun, diantara 6 orang anak tersebut

hanya terdapat 1 orang anak yang sudah memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Permasalahan yang dialami oleh anak jalanan tersebut yakni diantaranya karena faktor ekonomi, kekerasan, keadaan orang tua yang mengalami broken home, dan karna kemauan sendiri juga jakan dari teman-temannya. Jika anak jalanan terjaring dalam operasi Satuan Polisi Pamong Praja 1 (satu) kali maka anak tersebut dapat dikembalikan kepada orang tuanya, jika sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali bahkan lebih maka anak tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua atau keluarganya ketika keluarga masih sanggup menerimanya, jika orang tua atau keluarga sudah tidak mau menjemput di Dinas Sosial dan sudah tidak sanggup untuk menerima anak tersebut, maka jalan alternatif dari Dinas Sosial yakni anak jalanan tersebut di tempatkan di Panti Asuhan atau Pondok, jika anak tersebut masih bisa di bina dan diberi pelatihan maka Dinas Sosial akan mengirim anak jalanan tersebut ke tempat pelatihan yang ada di kabupaten jombang yakni di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) sehingga anak dapat memiliki keterampilan sebagaimana yang ada di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), akan tetapi jika anak tersebut sudah tidak memungkinkan untuk di tempatkan di Panti Asuhan atau Pondok dan di tempat pelatihan maka alternatif terakhir anak jalanan tersebut harus di rehabilitasi.

Ketika ada anak jalanan dari luar kota maka penanganannya yakni Dinas Sosial mendata anak tersebut berdomisili di kota mana dia tinggal, dan Dinas Sosial kabupaten jombang memberikan informasi kepada Dinas Sosial kota anak tersebut berdomisili. Jika keluarga bisa langsung di hubungi oleh dinas sosial maka bisa langsung menghubungi keluarganya. Jika anak tersebut tidak mengetahui sama sekali dimana dia berdomisili dan tidak mengetahui keluarganya sama sekali maka anak dapat di tempatkan di panti asuhan atau di tempat pelatihan di Kabupaten Jombang.

#### **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang**

Dalam kehidupan, kita banyak menemui anak jalanan yang belum diketahui identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). untuk mengetahui pengurusan identitas bagi anak jalanan yang rentan administrasi, kita perlu menanyakan secara

langsung terhadap anak jalanan yang terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

Prosedur pengurusan identitas anak jalanan ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang harus melalui Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang sudah mengarahkan anak jalanan tersebut untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas penduduk berdomisili di Kabupaten Jombang.

Bagi anak jalanan yang rentan administrasi anak tersebut dapat membuat identitas setelah diketahui tempat tinggalnya (Domisili) yang tempatnya sudah menetap di desa atau wilayah tersebut. Setelah itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanpa Identitas (SKPTI).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang melacak identitas keluarga anak jalanan tersebut. Jika identitas keluarga anak jalanan tersebut diketahui maka anak jalanan tersebut dapat langsung mengikuti prosedur pengurusan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jika identitas keluarga anak jalanan tersebut tidak diketahui maka anak jalanan tersebut pengurusan identitasnya termasuk kedalam anak jalanan yang rentan terhadap administrasi.

Untuk jangka waktu dari Surat Pengganti Tanpa Identitas (SKPTI) ini berlaku selama 1 (satu) tahun. Setelah 1 (satu) tahun surat ini dinyatakan tidak berlaku dan anak jalanan tersebut baru bisa melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Identitas lainnya yang akan dibuatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jombang.

### **Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumberdaya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sebagai sebuah institusi pelayanan hingga 31 Desember 2018 memiliki personil karyawan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) dimana pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dan Tenaga Honorer sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang merupakan instansi pelayanan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan dan pengesahan kejadian vital penduduk untuk memperoleh kepastian hukum dan tertib Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil. Cakupan pencatatan yang dilaksanakan meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak. Dokumen hasil pencatatan sipil ini merupakan dokumen yang berlaku universal.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Penerapan SIAK tersebut dilaksanakan sebagai upaya penertiban Administrasi Kependudukan melalui kegiatan digitalisasi. Sebagai instansi yang menyediakan jasa layanan secara langsung kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dituntut untuk memberikan pelayanan secara prima. Tuntutan tersebut dapat terpenuhi melalui peningkatan kualitas dari sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan mengenai Pengurusan Identitas Kartu Tanda Penduduk terhadap Anak Jalanan yang Tidak Memenuhi Syarat Administratif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jombang) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengurusan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) terhadap anak jalanan yang rentan administrasi dapat diketahui bahwa anak tersebut bisa langsung mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang sudah memberikan pengarahan dan tempat domisili sehingga bisa mengurus Surat Keterangan Pengganti Tanpa Identitas (SKPTI) ke Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

2. Hambatan yang terdapat dalam Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah minimnya data yang di miliki oleh anak jalanan yang rentan administrasi, disebabkan sulitnya melacak identitas keluarga anak jalanan tersebut.

### **Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengurusan Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) terhadap anak jalanan di wilayah Kabupaten Jombang harus lebih di perhatikan, sehingga mengurangi angka rentannya administrasi kependudukan terhadap anak jalanan di wilayah kabupaten jombang.
2. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat meneliti lebih lanjut mengenai faktor lain yang juga mempengaruhi pembuatan identitas administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Jombang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

#### **BUKU**

Usman, Rachmadi. (2019). Hukum Pencatatan Sipil, Jakarta: Sinar Grafika.

#### **Jurnal**

Arfan Kaimudin, (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia, Yurisprudensi Jurnal fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Vol 2. No. 1